

POTRET PENDIDIKAN INKLUSIF SD MUHAMMADIYAH SUMBEREJO, KECAMATAN KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nugraheni Dwi Budiarti

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
nd_budiarti@yahoo.com

Sugito

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
kanggito@yahoo.com

Abstract

PORTRAIT OF INCLUSIVE EDUCATION OF SD MUHAMMADIYAH, KARANGMOJO SUB-DISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY. SD Muhammadiyah Sumberejo is one of the Islamic schools and is also an inclusive school in Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul District. This study aims to reveal: 1) the history of inclusive education of SD Muhammadiyah Sumberejo, 2) social interaction of students of SD Muhammadiyah Sumberejo, and 3) parent-community school partnerships in the development of inclusive education at SD Muhammadiyah Sumberejo. This research is a qualitative type with case study design. The results show that: inclusive education of Muhammadiyah Sumberejo elementary school formally started as one of the schools for unlimited integrated education trial by Puslitjak Balitbang, Depdiknas in the late 90's with 6 other schools in cluster SDN Karangmojo III, Karangmojo Sub-district, Gunungkidul Regency. In general, there has been an attempt by the school to create good social interaction between regular students and special needs students, but there are occasional "exclusive" practices from regular students to special needs students, and established school-parent-community partnerships that foster development inclusive education in schools e.g. in

the form of communication and socialization, joint committees, and joint religious activities.

Keywords: *Inclusive Education, Elementary School, Social Interaction of Students, School Partnership.*

Abstrak

SD Muhammadiyah Sumberejo adalah salah satu sekolah berbasis Islam dan juga merupakan sekolah inklusif di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Studi ini bertujuan untuk mengungkap : 1) Dinamika pendidikan inklusif SD Muhammadiyah Sumberejo, 2) interaksi sosial para siswa SD Muhammadiyah Sumberejo, dan 3) Kerjasama sekolah, orangtua dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo. Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo secara formal dimulai saat sekolah ini dijadikan salah satu sekolah untuk uji coba terbatas pendidikan terpadu oleh Puslitjak Balitbang, Depdiknas pada akhir tahun 90-an bersama 6 sekolah lain di gugus SDN Karangmojo III, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, sudah ada upaya dari sekolah agar tercipta interaksi sosial yang baik antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, namun kadang masih muncul praktik “eksklusif” dari siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus, dan terjalin Kerjasama sekolah-orang tua-masyarakat yang membantu pengembangan pendidikan inklusif di sekolah misalnya dalam bentuk komunikasi dan sosialisas, komite bersama, dan kegiatan keagamaan bersama.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar, Interaksi Sosial Siswa, Kerjasama Sekolah.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif mulai mendapat perhatian setelah adanya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan pada tahun 1991 di Bangkok. Hasil deklarasi ialah education for all atau pendidikan untuk semua. Sebagai tindak lanjutnya pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan Inklusif yang dikenal dengan “The Salamanca Statement on Inclusive

Education". Dokumen inilah yang merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusif, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Pernyataan Salamanca (1994) menyatakan bahwa kelas khusus, sekolah khusus atau bentuk-bentuk lain pemisahan anak penyandang cacat dari lingkungan regulernya hanya dilakukan jika hakikat atau tingkat kecacatannya sedemikian rupa, sehingga pendidikan di kelas reguler dengan menggunakan alat-alat bantu khusus atau layanan khusus tidak dapat dicapai secara memuaskan.

Pada dasarnya model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi, di Indonesia model pendidikan segregasi diwakili dengan keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Model ini "menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya." (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004: 6). Jekinson (1997) dalam Wang (2009: 154) menyatakan bahwa dalam segregasi, anak-anak penyandang disabilitas secara tradisional dididik dikelas terpisah, dirancang khusus untuk memenuhi ketidakmampuan kapasitas tertentu siswa. Pendidik menemukan bahwa segregasi ini adalah sistem menguntungkan, karena mereka mampu menerapkan kurikulum yang diformulasikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Demikian juga, anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan keuntungan dari sistem ini tidak hanya karena kurikulum yang tepat, tetapi juga pemikiran bahwa bisa menghadiri kelas dengan teman sekelas yang memiliki ketunaan yang sama dapat meningkatkan kepercayaan diri atau harga diri mereka juga. Selain itu, menjadi terpisah menjamin keamanan dan dukungan yang cukup untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun di sisi lain, pemisahan anak-anak berkebutuhan khusus melibatkan banyak isu yang menjadi perhatian, yang digeneralisasikan menjadi empat poin utama argumen, meliputi: prestasi akademik siswa, efek merugikan dari label yang terkait dengan penempatan di luar *mainstream*, ketidakseimbangan rasial di pendidikan khusus, dan kemajuan terbaru dalam kecepatan kurikulum individual yang akan memungkinkan untuk mengakomodasi siswa penyandang disabilitas di kelas reguler (Dunn (1968) dalam Wang (2009:154)).

Sedangkan bergabungnya ABK dalam lingkungan belajar bersama anak normal lainnya dapat dilakukan dengan tiga model,

yaitu : *mainstreaming*, integratif, dan inklusif. Belajar dari berbagai kelemahan model segegratif, muncullah model *mainstreaming* pada pertengahan abad XX. Model ini memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK). Foreman (2008: 13) menyatakan siswa di-*mainstreaming*-kan saat mereka terdaftar atau berpartisipasi dalam kelas reguler. Istilah ini juga digunakan secara lebih luas untuk menggambarkan layanan berbasis standar masyarakat. Misalnya, biasanya dianggap kemudahan untuk orang dewasa penyandang cacat mengakses layanan utama seperti pustaka masyarakat, fasilitas olahraga dan layanan kesehatan.

Pendidikan integratif merupakan “suatu pendidikan yang dilandasi oleh konsep *equal educational opportunity*” (Semiawan, 2008: 77). Integrasi siswa penyandang cacat ke sekolah reguler telah dilakukan selama bertahun-tahun dengan cara yang berbeda-beda. Mereka dipindahkan dari kelas/sekolah khusus ke kelas reguler ketika dianggap siap mengikuti kelas reguler. “Mereka sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan pengetahuannya bukan menurut usianya” (Mangunsong, 2011: 15). Pada semua model integratif, pada prinsipnya anak ABK harus menyesuaikan diri dengan ketentuan sistem dan aktifitas kelas reguler. Mereka hanya seperti diberi izin untuk berada di dalam kelas reguler tanpa hak penuh sebagai anggota kelas itu. Komponen pendidikan integrasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendidikan reguler yang terdiri atas masukan (input), unsur penunjang, proses KBM, dan keluaran hasil (output).

Dalam dunia pendidikan, inklusif adalah suatu pernyataan bahwa hak fundamental setiap orang adalah untuk dapat mengakses pendidikan dan tidak di-eksklusikan (Stubbs, 2008: 18). Inklusif juga mencoba memberikan gambaran dan persepsi yang lebih positif untuk memberikan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Pernyataan berikut memberikan penjelasannya:

Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini bisa dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan bagi anak yang selama ini tersisihkan

(anak berkebutuhan khusus), tapi juga semua anak, orang tua, guru, administrator sekolah, dan anggota masyarakat (Smith, 2013: 43).

Secara yuridis formal, pemerintah telah membuat landasan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat . Landasan yuridis formal lainnya adalah : UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 dan 49, UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (PENSIF) bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat Istimewa.

Pandangan agama (khususnya Islam) memandang pendidikan inklusif sebagai konsep pendidikan yang sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Pentingnya memperoleh pendidikan bagi setiap muslim dan muslimah dengan segala perbedaan serta keragaman bangsa dan sukunya tertuang di dalam Quran surat *Al-Hujurat* ayat 13." Perintah untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja, terutama pada mereka yang membutuhkan tercantum pada Quran surat *Al-Maidah* ayat 2 "(Mohammad Takdir Ilahi, 2013:75-76). Sedangkan penjelasan mengenai perbedaan kesejahteraan hidup pada umat manusia dijelaskan dalam Quran surat *Az-Zukkruf* ayat 32. Landasan pendidikan Inklusif menurut Islam jika ditinjau dari sunnah atau Hadist seperti yang tercantum pada sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Di dalam surat *Abasa* dijelaskan bahwa kita semua wajib peduli terhadap manusia lain yang memiliki kekurangan fisik ataupun mentalnya. Allah menegur Rasulullah dengan surat ini karena kekhilafan beliau menunjukkan raut muka ketidaksenangan ketika seorang buta dan miskin bernama Abdullah Bin Ummi Maktum datang saat beliau berdialog dan sibuk mengurus sejumlah pembesar Quraisy. Surat ini merupakan petunjuk Islam dalam bersikap kepada sesama ciptaan Allah yang berbagai macam kondisinya.

Santoso (2005) dalam Wahyuningsih (2016: 6) mengungkapkan bahwa beberapa poin singgung antara pendidikan inklusif dengan ajaran Islam diantaranya adalah : nilai pendidikan sebagai liabilitas/hak, asas non-segregasi, perspektif holistik melihat peserta didik dan

cara melihat penghalang yang lebih berorientasi ke faktor eksternal, terutama lingkungan sekolah. Indonesia adalah bangsa yang beragama, karenanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks agama, karena pendidikan merupakan jalan dan tangga utama untuk mengenal Tuhan.

Dalam konteks tradisi pendidikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah mempunyai ciri-ciri : 1) Lingkungan pendidikan (iman, ilmu, amal), 2) Kurikulum (ilmu amaliah, amal amaliah, ulama intelek, intelek ulama), 3) Ethos Kerja (siapa menanam mengetam), dan 4) Organisasi Penyelenggaraan (Mandiri dan Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah) (Zamroni, 2014: 134-136). Menjawab ketertinggalan pendidikan di kalangan umat Islam, KHA Dahlan melakukan pembaharuan pendidikan, dengan memperkenalkan pola pendidikan Barat dipadukan dengan pendidikan Islam. Dalam kondisi umat Islam yang terbelakang karena kebodohan, KHA Dahlan memandang pentingnya pendidikan. Salah satu ajaran KHA Dahlan yang sangat revolusioner adalah ketika menyampaikan tafsir surat *Al Ma'un*, yang tidak hanya ditujukan kepada murid-murid laki-laki, tetapi juga disampaikan pada murid perempuan. Beliau juga menganjurkan kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Beliau pernah berkata:

“Orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan, jangan sekali-sekali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama jangan sampai hanya tinggal pengetahuannya saja” (Mua'arif, 2012: 85).

Dengan hadirnya konsep pendidikan inklusif di Indonesia, banyak sudah institusi pendidikan Muhammadiyah pada berbagai jenjang yang menerapkannya dalam sistem pendidikannya. Jejak keterlibatan sekolah Muhammadiyah dalam upaya awal pengimplementasian pendidikan inklusif di Indonesia disampaikan oleh Hadis (2005: 4), yaitu bahwa beberapa wilayah di Indonesia dengan inisiatif sendiri memperkenalkan pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah reguler mereka, misalnya di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sejak tahun 2001 mengimplementasikan pendidikan inklusif di 12 sekolah reguler, yang mana dua sekolah menerima anak-anak dengan keterbelakangan mental. Salah satunya

adalah di sebuah SD Muhammadiyah. Diceritakan sekolah ini mempunyai 120 siswa, dan diantaranya terdapat dua orang anak laki-laki penyandang *downs syndrome*. Oleh sang ibu mereka sudah dimasukkan ke sekolah itu sejak kelas satu, karena sekolah luar biasa yang bisa menerima siswa keterbelakangan mental seperti mereka sangat jauh dari rumah mereka yang berada di pegunungan. Keluarga mereka sangat miskin. Orangtua anak-anak tersebut merasa nyaman, bahagia, dan bangga dengan kenyataannya diterimanya kedua anak mereka di SD Muhammadiyah tersebut. Salah satu anak masih terlihat malu dan menarik diri, tetapi anak yang kedua sangat bersemangat dan gembira, menyukai menari dan menikmati musik. Dia juga terlibat sangat ramah, dia dapat bergaul dengan teman-temannya yang normal. Para guru cukup aktif mengajar mereka menggunakan kurikulum yang dimodifikasi untuk pelajaran matematika dan subyek akademis lainnya. Sedangkan untuk pelajaran seni, agama, dan olahraga, mereka diintegrasikan dengan anak-anak lain. Evaluasi akademik disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka.

Dari banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang telah menerapkan pendidikan inklusif, terdapat satu sekolah Muhammadiyah yang mendapat perhatian khusus dari peneliti, yaitu SD Muhammadiyah Sumberejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. SD Muhammadiyah Sumberejo adalah satu-satunya SD swasta berbasis Islam di Gugus SDN Karangmojo III, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah Dasar ini berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1959 di atas tanah milik seluas 1.612 m², beralamat di Sumberejo RT 02 RW 09, Karangmojo berjarak 3 km dari pusat Kecamatan, sedangkan jaraknya ke Disdikpora Kabupaten Gunungkidul adalah 10,26 Km.

SD Muhammadiyah Sumberejo juga memiliki sekolah *filial* yaitu SD Muhammadiyah Sumberejo II yang berada di Ngepung, Karangmojo. Sama seperti SD di Gunungkidul pada umumnya, SD Muhammadiyah juga sering mengalami masalah rendahnya jumlah peserta didik baru tiap tahunnya, tiap tahunnya hanya sekitar belasan siswa baru (seringkali kurang dari duapuluh anak) yang diperoleh untuk satu kelas. Bahkan SD Muhammadiyah Sumberejo

II di Ngepung sering hanya mendapat siswa baru kurang dari 5 orang tiap tahunnya. Namun untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sekitar maka proses belajar mengajar tetap dijalankan.

Ciri khas sekolah ini adalah sebagai sekolah inklusif swasta yang dalam sistem pendidikan bermuatan nilai-nilai Islam khas Gerakan Muhammadiyah. Sekolah ini berprinsip bahwa pendidikan inklusif yang pada praktiknya bersedia menerima anak berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai peserta didik selaras dengan ajaran Agama Islam. Dari beberapa referensi dan hasil wawancara saat *pra survey* penelitian ini, diperoleh informasi bahwa SD Muhammadiyah Sumberejo adalah termasuk salah satu dari tujuh SD di Gugus SDN Karangmojo III yang digunakan sebagai lokasi uji coba terbatas pendidikan terpadu oleh Puslitjak Balitbang Diknas pada akhir tahun 90-an. Hasil uji coba tersebut selanjutnya oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), dipergunakan sebagai dasar sosialisasi dan praktik implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jadi bisa dinyatakan bahwa embrio pendidikan inklusif di Indonesia, dimulai dari uji coba pada 7 SD di Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul tersebut.

Dengan memandang bahwa masih kurangnya penelitian dan publikasi tentang peran SD Muhammadiyah Sumberejo dan 6 SD lainnya di Kecamatan Karangmojo dalam perintisan pendidikan inklusif di Indonesia, maka peneliti menganggap bahwa ini adalah topik yang layak diangkat dan diteliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus yang mencoba mengkaji secara mendalam tentang gambaran bagaimana pendidikan inklusif yang dijalankan di SD Muhammadiyah Sumberejo. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap : 1) sejarah pendidikan inklusif SD Muhammadiyah Sumberejo, 2) interaksi sosial para siswa SD Muhammadiyah Sumberejo, dan 3) Kerjasama sekolah, orangtua dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo.

Teknik pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif dan prosedur *snowball* (bola salju). Sebagai *key informant* (narasumber kunci) dalam penelitian ini Kabid TK dan SD Disdikpora Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai Ketua Pokja Inklusif Kabupaten Gunungkidul, dan Kepala

Sekolah Inklusif Ekakapti sekaligus sebagai Ketua Forum Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) DIY. Dari *key informant* (narasumber kunci) ini kemudian diperoleh informasi untuk mendapatkan informan-informan lain (narasumber pelengkap) yang bisa memberikan data sesuai fokus penelitian, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, orangtua murid, dan beberapa informan lain yang berkompeten memberikan keterangan sesuai fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk membantu peneliti sebagai *human instrument* maka digunakan instrumen penunjang yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Data yang diperoleh dari dalam penelitian juga ditulis dalam bentuk catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman (*interactive model*). Aktifitas dalam analisis data tersebut terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

B. Pembahasan

1. Sejarah Pendidikan Inklusif SD Muhammadiyah Sumberejo

Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah Sumberejo dan Kecamatan Karangmojo pada umumnya tidak langsung menerapkan konsep inklusif. Kabid TK dan SD Disdikpora Gunungkidul, Ibu Sri Andari, menyatakan bahwa informasi bahwa sebenarnya meski para praktisi pendidikan di Kecamatan Karangmojo itu dulu belum mengenal istilah pendidikan terpadu dan pendidikan inklusif, pada kenyataannya sebenarnya sejak lama sekolah-sekolah reguler di Kecamatan Karangmojo sudah banyak yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan murid regulernya, mengingat banyaknya anak berkebutuhan khusus (terutama *slow learner*) di wilayah tersebut. Hal ini terutama dilakukan oleh kesadaran orang tua ABK sendiri yang tidak mau memasukkan anaknya ke SLB karena jauh dari rumah atau atau alasan lainnya.

Pada sekitar tahun 83-84 dilakukan pendataan di beberapa kecamatan untuk mengetahui jumlah anak berkelainan pada usia sekolah untuk tujuan perintisan SLB di Ngawis. Menurut dua pelaku sejarah, yaitu Bapak Bambang Suminto dan Sunarto,

diketahui terdapat sekitar 2.000 anak berkelainan usia sekolah di beberapa kecamatan di Gunungkidul. Data itu belum menunjukkan keseluruhan orang berkelainan di Kabupaten Gunungkidul, karena belum diketahui jumlah orang usia dewasa yang berkelainan, dan pendataan belum dilakukan pada seluruh kecamatan di Gunungkidul. Jadi ada kemungkinan jumlah total penduduk Gunungkidul yang berkelainan akan lebih tinggi dari data yang diperoleh. Tapi dari pendataan ini dapat diketahui bahwa dari 2.000 anak berkelainan itu belum semuanya tertangani dan mendapat pendidikan.

Sejarah pendidikan khusus di Kecamatan Karangmojo, tidak jauh beda dengan apa yang terjadi wilayah lain pada umumnya, yaitu dimulai dari pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi di Kecamatan Karangmojo ditandai dengan berdirinya SLB di Ngawis. Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku sejarah, yaitu: Bapak Bambang Suminto, Bapak Sunarto, Ibu Winarti Linda Zabeth, serta beberapa saksi sejarah, yaitu : Bapak Sunu Gunarto dan Sunu Raharjo, yang juga diperkuat dengan informasi dari beberapa dokumen yaitu, maka dapat diperoleh informasi bahwa perintisan SLB ini dan beberapa SLB di Gunungkidul lainnya, tidak lepas dari peran tokoh bernama Bambang Suminto, putra asli Girikarto, Panggang, Gunungkidul, yang merupakan lulusan SGPLB Surabaya Tahun 1981. Pemikiran ini semua berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya anak penyandang disabilitas di Gunungkidul yang terabaikan dan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Atas bimbingan seorang tokoh tunanetra bernama Bapak Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed (Sekjen Federasi Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (FKTI), pembina program SD Terpadu, yang juga dosen IKIP Yogyakarta (sekarang menjadi UNY)), Bambang Suminto dan teman-temannya yang merupakan gabungan lulusan SGPLB Surabaya dan SGPLB Yogyakarta Tahun 1981, mendirikan SLB Bakti Putra di Ngawis. Perintisan SLB ini tidak lepas dari bantuan Lurah R. Wiryoduguno (Lurah Ngawis 1946-1997) beserta tokoh dan aparat setempat. Sebelumnya Bambang Suminto dan kawan-kawannya itu juga sempat merintis SLB di Daerah Gadungsari, Wonosari. Namun SLB rintisan di Gadungsari ini kurang berkembang karena pro kontra masyarakat setempat dan karena memang sudah ada sebuah SLB swasta yang tidak jauh dari SLB rintisan tersebut, yaitu sebuah SLB swasta bernama SLB Yuwana Putra (sekarang SLB Negeri I Wonosari).

Beberapa pengajar di SLB Bakti Putra Ngawis inilah yang kemudian turut berperan dalam pengembangan pendidikan terpadu di bawah binaan Bapak Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed pada tahun 80-an sesaat setelah SLB itu berdiri. Pendidikan terpadu pada tahun 80-an ini cenderung ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak tunanetra untuk dapat belajar di sekolah reguler dengan anak normal lainnya.

Secara historis dan empiris, pendidikan terpadu menjadi semacam tahap metamorfosis menuju pendidikan inklusif. Meskipun masih kaburnya informasi tentang kapan sebenarnya peralihan era pendidikan terpadu ke era pendidikan inklusif di Kecamatan Karangmojo, tapi beberapa hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah memberikan petunjuk bahwa pada akhir tahun 1990-an terdapat proyek pemerintah yang dilaksanakan di 7 SD di Kecamatan Karangmojo yang masih menggunakan nama pendidikan terpadu, tapi sebenarnya sudah merupakan proses menuju pendidikan inklusif. Pada akhir tahun 90-an itulah sebenarnya istilah inklusif sudah mulai dikenalkan, tapi istilah yang digunakan untuk proyek pemerintah saat itu masih pendidikan terpadu. Jika sekolah terpadu yang dikembangkan pada tahun 80-an lebih menekankan pada pelayanan pendidikan khusus bagi penyandang tunanetra maka pendidikan terpadu menuju inklusif pada akhir tahun 90-an sudah melayani berbagai ketunaan bagi peserta didiknya. Namun siswa berkebutuhan khusus yang dilayani memang mayoritas masuk kategori siswa lamban belajar.

Beberapa pelaku dan saksi sejarah, yaitu: Bapak Bambang Suminto, Bapak Sunarto, Ibu Winarti Linda Zabeth, Bapak Sumarno (Kepsek SMP Ekakapti Karangmojo), Bapak Wiji Suparno (Pengawas PLB Disdikpora Provinsi DIY), dan diperkuat dokumentasi: laporan Kepala Bidang penelitian Belajar-Mengajar Puslitjak Balitbang Depdiknas Tahun 2002 menjelaskan bahwa sekitar akhir tahun 90-an terdapat perintisan sekolah terpadu (menuju inklusif) pada 7 SD di sebuah gugus SD di Kecamatan Karangmojo. SDN Karangmojo III menjadi *base camp*-nya. Lebih lanjut Ibu Sri Andari (yang kini menjabat sebagai Kabid TK dan SD Disdikpora Gunungkidul) menceritakan bahwa saat itu beliau masih menjadi guru di SD tersebut. Dari konfirmasi dengan berbagai pihak (para praktisi di

Gugus SDN karangmojo III dan sekitarnya), terdapat informasi yang bisa menjadi klarifikasi penguat nama-nama SD yang termasuk 7 SD yang ditunjuk sebagai *Piloting Project* Pendidikan terpadu (menuju inklusif) pada akhir tahun 90-an tersebut adalah di Gugus SD Karangmojo III, yang mana SDN Karangmojo III sebagai SD Inti (tempat *base came*), sedangkan SD Imbasnya adalah SDN Gedangan II, SDN Sokoliman II, SDN Karangwetan, SDN Gedangan I, SD Muhammadiyah Sumberejo, dan SDN Pangkah. Namun pada sekitar pertengahan tahun 2000 SDN Sokoliman II di-*regrouping* dengan SDN Gedangan II, dan menjadi SDN Gedangan. Jadi sekarang tinggal 6 SD yang dulunya menjadi tempat *Piloting Project* Pendidikan Terpadu di Sekolah Dasar, yaitu SDN Karangmojo III (sebagai SD ini), dan SD Imbasnya adalah SDN Gedangan, SD Muhammadiyah Sumberejo, SDN Gedangan 1, SDN Karangwetan, dan SDN Pangkah.

Subijanto (2002: 16) menuliskan tentang ujicoba pendidikan terpadu di 7 SD di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

“Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (Puslitjak) Balitbang Depdiknas telah melakukan ujicoba terbatas pendidikan terpadu di sekolah dasar sejak tahun anggaran 1999/2000. Uji coba tersebut dilaksanakan di Gugus 2 Sokoliman, Kecamatan Karangmojo yang meliputi SDN Karangmojo 3, SDN Sokoliman 2, SDN Gedangan 1, SDN Gedangan 2, SDN Pangkah, SDN Karangwetan, dan SD Muhammadiyah Sumberejo. Peran Puslitjak dalam ujicoba dimaksud adalah sebagai fasilitator dengan memanfaatkan berbagai narasumber dan instansi terkait. Model SD Terpadu yang dikembangkan diharapkan dapat diterapkan di sekolah dasar pada umumnya, terutama yang dalam lingkungan radius tertentu terdapat SLB, sehingga lebih terbantu dari aspek penyediaan guru pembimbing khusus”.

Meskipun terdapat kekurangtepatan dalam menuliskan lokasi pelaksanaan uji coba pendidikan terpadu di Kecamatan Karangmojo (berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan), kutipan tulisan Subijanto di atas cukup memberikan gambaran tentang bagaimana upaya uji coba pendidikan terpadu dilaksanakan di sebuah gugus SD di Kecamatan Karangmojo (Gugus SDN Karangmojo 3) yang terdiri dari 7 SD, yaitu : SDN Karangmojo III, SDN Gedangan II, SDN Sokoliman II, SDN Gedangan 1, SDN Karangwetan, SD

Muhammadiyah Sumberejo, dan SDN Pangkah (sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan di atas).

Sekolah yang menjadi *Piloting Project* (tempat ujicoba) pendidikan terpadu tersebut mendapatkan tugas dan kewenangan tertentu, misalnya mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, mendaftarkan siswa ABK yang memerlukan pelayanan khusus dan melaporkannya, berkonsultasi dengan GPK, memberikan pelayanan khusus dan memberikan evaluasi pada peserta didik, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Peran Puslitjak Balitbang Depdiknas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dengan memanfaatkan berbagai narasumber pada instansi terkait. Beberapa pelatihan terkait pendidikan khusus pada siswa ABK diberikan pada para praktisi pendidikan di gugus SD tersebut, mereka diminta untuk mengimbaskan ke SD-SD Lain di sekitarnya. Mereka melakukannya lewat pemberian informasi pada saat rakor kepala sekolah, guru, KKG, dan lain sebagainya, karena keterbatasan anggaran.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan informasi dari beberapa referensi lain. Sejak tahun 1997 Indonesia telah “meratifikasi” kesepakatan Salamanca 1994 tentang Pendidikan Inklusif, selanjutnya pada akhir tahun 90-an, Balitbang Dikbud melakukan uji coba penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di 7 SD di Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul Yogyakarta. Hasil uji coba tersebut selanjutnya oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), dipergunakan sebagai dasar sosialisasi dan praktik implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jadi bisa dinyatakan bahwa embrio pendidikan inklusif di Indonesia, dimulai dari uji coba pada 7 SD di Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul tersebut. Suroto (2002) dalam Budiyanto (2006: 2) menyatakan bahwa “Pusat Penelitian Balitbang Diknas mengadakan ujicoba pendidikan inklusif di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dengan mengadopsi konsep dasar sekolah terpadu dan disempurnakan dengan menggunakan pendekatan inklusif”. Dalam ujicoba pengembangan pendidikan terpadu di 7 SD di Kecamatan Karangmojo itu, Puslitjak hanya berfungsi sebagai fasilitator. Subijanto (2002: 17) melaporkan bahwa model yang dikembangkan tidak memberikan seluruh komponen yang diperlukan, tetapi hanya pelatihan dan dana pendukung secara terbatas. Informasi tentang rintisan sekolah inklusif juga dituliskan

oleh Ifdlali (27 Januari 2010), yang menyatakan bahwa pada sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diperuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapatkan pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap rintisan sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut.

Sejak akhir tahun 90-an itulah, SD Muhammadiyah Sumberejo dan 6 SD lainnya di Gugus SDN Karangmojo III menjadi *piloting project* pendidikan terpadu menuju inklusif, dan mereka dihimbau untuk mengimbaskan ke SD-SD lain di sekitarnya. Mulai tahun 2000-an, istilah pendidikan inklusif mulai diperkenalkan untuk penyebutan sekolah reguler yang melayani pendidikan ABK untuk belajar bersama dengan anak reguler. Nasichin (2001) dalam Sunardi (2010:27) menjelaskan bahwa istilah inklusif semakin populer dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan luar biasa (PLB). Pengembangan pendidikan inklusif menjadi salah satu program Direktorat Pendidikan Luar Biasa mulai tahun 2001. Pada tahun 2000-an mulai bermunculan beberapa rintisan sekolah inklusif di berbagai kota. Hingga pada tahun 2009 terbit Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pada salah satu pasal dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu SD dan satu SMP pada satu setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun mengingat kompetensi guru-guru sekolah reguler di Kabupaten Gunungkidul belum memadai untuk menangani siswa ABK maka mulai tahun 2011 banyak dilakukan diklat-diklat terkait pendidikan inklusif bagi para guru. Diklat ini dilaksanakan sesaat setelah di-SK-kan 239 sekolah reguler di Gunungkidul sebagai sekolah inklusif. Berikutnya pada SK Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul No. 420/109/KPTS/2011 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 241 SPPI di Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI), termasuk SD Muhammadiyah Sumberejo.

Pada bulan Juli 2013, Gunungkidul melakukan *launching* sebagai Kabupaten Inklusif. Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para guru di sekolah reguler yang menjadi SPPI berbagai diklat terus dilakukan. Diklat-diklat itu mendatangkan berbagai narasumber yang berasal dari SLB, PT, dan instansi terkait. Selain itu juga terdapat bantuan dana dari pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler tersebut. Pada awalnya yaitu tahun 2011 terdapat 239 sekolah inklusif, kini di Kabupaten Gunungkidul terdapat sekitar 300 sekolah inklusif pada berbagai jenjang pendidikan. Dengan berjalannya waktu dan dinamika yang terus dialaminya, SD Muhammadiyah Sumberejo kini tetap dengan statusnya sekolah inklusif yang menerima ABK sebagai peserta didiknya untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler lain pada umumnya. Dari awal mula menjadi sekolah inklusif, beberapa kategori ABK diterima di SD Muhammadiyah diantaranya adalah : tunagrahita, lamban belajar dan tuna ganda. Namun mayoritas siswa berkebutuhan khusus tersebut adalah kategori lamban belajar. Para siswa ini sudah melalui proses identifikasi awal yang dilakukan oleh para guru reguler dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dilanjutkan proses asesmen yang dilakukan oleh tim dari SLB Negeri 1 Wonosari. Berdasarkan identifikasi dan asesmen inilah dapat diketahui kebutuhan khusus para siswa tersebut untuk kemudian diberikan penanganan dan layanan pembelajaran sesuai dengan kategori dan tingkat kebutuhan khususnya.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, diperoleh data siswa berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah Sumberejo pada Tahun ajaran 2016/2107 sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Siswa Berkebutuhan Khusus Muhammadiyah Sumberejo Tahun Ajaran 2016/2017

Kelas	Jenis Kelamin		Jenis Kebutuhan Khusus	Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		
I	1	0	Tuna Grahita	1*
III	1	0	Tuna Grahita	1
	0	1	Tuna Grahita	
IV	0	1	Lamban Belajar	6
	4	0	Lamban belajar	
V	0	2	Lamban Belajar	7
	5	0	Lamban Belajar	

	0	2	Lamban Belajar	5
VI	2	0	Lamban belajar	
	0	1	Tuna Ganda	

Sumber : Data Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK) yang telah diasesmen Sekolah SD Muhammadiyah Sumberejo Tahun Ajaran 2016/2017, (*) adalah siswa pindahan dari SLB yang sudah teridentifikasi sebagai tunagrahita

Dari tabel I dapat diketahui bahwa terdapat 65% siswa lamban belajar dari total semua ABK yang bersekolah di SD Muhammadiyah Sumberejo pada tahun ajaran 2016/2017. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Afrianty dan Soldatic (2016) yang mencoba menyoroti pendidikan inklusif di institusi Islam di Indonesia bahwa seringkali para ABK yang diterima di sekolah-sekolah inklusif di Indonesia terbatas pada anak-anak penyandang cacat neurologis atau kognitif, bukan cacat fisik, karena lingkungan binaan yang tidak dapat diakses.

Berdasarkan hasil penelitian Mukaffa, *et.all* (2017: 20-21), hasil pemeriksaan akademis ciri-ciri peserta didik yang memiliki taraf kecerdasan awal di bawah rata-rata, yaitu:

- a. Secara umum peserta didik agak kesulitan mengolah informasi dari lingkungan dan kesulitan untuk berpikir sistematis.
- b. Peserta didik dapat melakukan pengamatan ruang dengan cukup baik namun cenderung kesulitan dalam memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian serta berpikir analogi.
- c. Peserta didik kesulitan dalam melakukan analisa sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa untuk memahami suatu prinsip untuk diterapkan dalam situasi berbeda.
- d. Kesulitan untuk memahami suatu prinsip untuk diterapkan dalam situasi yang berbeda untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi masalah.
- e. Kesulitan dalam berpikir secara runtut dalam memahami rangkaian suatu masalah.

Foreman (2008) mencoba menjelaskan definisi pendidikan inklusif dengan dasar filosofinya, yaitu suatu sekolah inklusif seharusnya, tanpa pertanyaan apapun, menyediakan kebutuhan

semua anak dalam komunitasnya, apapun tingkat kemampuan dan ketidakmampuannya. Inklusif memang mencakup pengertian tentang luasnya akses pendidikan dan mengakui pentingnya pelayanan kebutuhan yang beragam pada setiap peserta didik, karenanya membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan butuh upaya untuk pengembangannya. “Inklusif berarti mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar” (UNESCO, 2007: 3).

Dengan segala keterbatasan dan hambatan yang dihadapinya, pada kenyataannya hingga kini SD Muhammadiyah Sumberejo tetap berusaha untuk melayani pendidikan inklusif bagi ABK di sekitar sekolah, yang tentunya dalam pelaksanaannya diupayakan sejalan dengan visi sekolah tersebut, yaitu “Terwujudnya insan yang sholih dan sholikhah, cerdas, dan berdaya mutu untuk meraih prestasi”. Peran kepala sekolah dengan dukungan berbagai pihak akan turut membantu perbaikan dan kualitas pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo.

2. Interaksi Sosial Para Siswa SD Muhammadiyah Sumberejo

Dalam lingkup sekolah SD Muhammadiyah Sumberejo dibudayakan sikap saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan penjelasan salah seorang guru di sekolah tersebut, yaitu Bapak Nur Achmad Guntur, seringkali para siswa dapat bekerjasama dalam kelompok baik itu siswa reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus, misalnya lewat belajar kelompok. Namun tidak dapat dipungkiri kadang masih terjadi konflik antar anak, tapi para pengajar masih menilainya dalam tahap ringan. Dalam suatu observasi pada penelitian ini juga tampak beberapa siswa berkebutuhan khusus tampak berbaur dan bermain dengan teman-temannya yang reguler di halaman sekolah.

Teori Vygotsky menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran. Teori ini juga menitikberatkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal (sosial), kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Aspek-aspek kultural historis dari teori ini menonjolkan pemikiran bahwa pembelajaran dan perkembangan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Cara siswa

berinteraksi dengan dunia mereka, dengan orang-orang, obyek, dan institusi-institusi di dalamnya, mengubah cara berpikir mereka (Schunk, 2012). Konsep dari teori perkembangan sosial Vygotski ini juga berhubungan dengan teori belajar sosial Bandura. Bandura dalam Schunk (2012: 163) mendiskusikan “perilaku manusia dalam sebuah kerangka timbal balik, antara perilaku-perilaku, variabel-variabel lingkungan, dan faktor-faktor personal seperti kognisi”.

Hasil wawancara dengan seorang ibu siswa ABK di sekolah tersebut, yaitu Ibu Siti Rohyati, bentuk hambatan para ABK di SD Muhammadiyah Sumberejo dalam berinteraksi sosial selain faktor gangguan dari orang sekitarnya, ada yang berasal dari dirinya sendiri, seperti yang dialami seorang siswi tuna ganda. Karena gangguan-gangguan tersebut, sempat terpikir oleh sang ibu untuk memindahkan anaknya ke SLB saja, agar anaknya bisa lebih dihargai teman-temannya.

Beberapa catatan lapangan hasil observasi memperkuat deskriptif interaksi siswi tuna ganda tersebut tersebut saat berada di sekolah. Selain penyandang *slow learner*, pada siswa tersebut terdapat kelainan pada kaki dan tampak ada kelainan pada bola matanya. Siswi tersebut tampak sangat pemalu, pendiam, dan tertutup dibanding teman-teman sekelasnya. Dia tidak mau berbaur dengan teman-temannya, meskipun seringkali guru kelasnya sudah meminta anak-anak perempuan yang lain untuk menemaninya. Saat teman-teman lainnya mau berinteraksi dengan teman lainnya di luar kelas, siswi itu akan memilih tetap berdiam diri di bangku paling belakang di pojok kelas. Dia juga sering menunduk dan menyembunyikan mukanya jika didekati orang lain. Hal ini menjadi penghambat baginya untuk dapat bergaul dan memperoleh teman dekat. Dalam beberapa catatan lapangan lainnya diperoleh juga deskripsi bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan para siswa reguler pada siswa yang berkebutuhan khusus. *Bullying* ini misalnya adalah dalam bentuk ejekan, digoda, disuruh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mendapat serangan fisik. Ketika mendapat *bullying* dari teman-temannya, respon dari para ABK di SD Muhammadiyah Sumberejo beragam, ada yang malu/minder, tapi ada juga yang tidak menanggapi bahkan tidak merasa terganggu. Anak-anak di SD Muhammadiyah Sumberejo sudah cukup familiar untuk istilah ABK bagi siswa yang mengalami

hambatan belajar. Sehingga beberapa anak yang termasuk ABK merasa biasa saja ketika dipanggil dengan istilah ABK oleh teman-temannya. Namun terdapat juga siswa yang merasa minder. Pada interaksi sosial anak-anak kelas tinggi juga tampak seorang anak perempuan yang merasa malu dan terdiam ketika salah satu temannya menyebutkan bahwa dia juga termasuk yang lamban belajar.

Beberapa catatan lapangan lainnya juga menggambarkan *bullying* yang dialami oleh seorang siswa *down syndrom* yang duduk di kelas I. Siswa ini adalah siswa baru pindahan dari SLB setempat. Karena dirasa jarak SLB dengan rumah cukup jauh, maka sang orangtua memindahkannya ke SD Muhammadiyah Sumberejo yang lebih dekat rumahnya. Siswa ini sudah lebih tua dari anak-anak kelas satu lainnya. Siswa itu beberapa kali mendapat serangan fisik dari temannya saat bermain ataupun belajar bersama, namun siswa itu tidak menangis maupun membalas. Perlakuan kurang menyenangkan pada siswa *downs syndrom* itu sering dilakukan oleh beberapa temannya baik laki-laki maupun perempuan. Siswa-siswa lain menceritakan kalau ABK itu suka jadi bahan tertawaan, ditarik-tarik tasnya, atau disuruh melakukan *pleset-plesetan* di lantai yang kotor. Namun sebenarnya ABK tersebut memiliki *social skills* yang baik sehingga banyak orang yang bersimpati padanya. Siswa tersebut tampak sopan dan ramah pada orang lain, meskipun mengalami gangguan komunikasi. Pada kesempatan lain, terlihat ABK tersebut mengikuti teman-temannya berwudhu dan melakukan sholat dhuha berjamaah dengan khusuk di mushola sekolah. Salah satu penjual di dekat sekolah yang juga masih kerabatnya juga menceritakan kalau siswa tersebut mengerti sopan santun meskipun memiliki kekurangan. Walau begitu ternyata ada juga di antara temannya yang bersimpati dan merasa kasihan padanya, Terlihat suatu saat siswa *downs syndrom* ini ini pulang sekolah bersama dengan beberapa temannya, dan asyik bercengkrama sepanjang perjalanan.

Dari temuan di atas, maka dapat dipastikan praktik eksklusi terhadap siswa berkebutuhan khusus masih terjadi di SD Muhammadiyah Sumberejo. Carrington & Macarthur (2012: 25) juga menyatakan, ketika seorang siswa berkebutuhan khusus mengalami *bullying* oleh teman dan gurunya maka dikatakan siswa tersebut mengalami eksklusi. Fitriyah (2017: 172) menyatakan

bahwa “Secara umum siswa yang menjadi sasaran *bullying* adalah siswa yang terlihat berbeda dengan siswa pada umumnya, entah perbedaan itu dilatarbelakangi karena kelebihan yang dimiliki atau justru kekurangan yang terlihat”. Lebih lanjut, hasil penelitian Fitriyah (2017: 175), menemukan bahwa :

“Sikap *bullying* dari guru maupun siswa dalam praksis lembaga pendidikan Islam bisa berwujud pada beragam tipe, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengolok-ngolok ketidakmampuannya, menggossip, menyabotase pertemanan, dan memfitnah, bahkan kemungkinan terburuknya pada tindakan-tindakan agresi yang bersifat fisik, seperti menjegal, meninju, memukul, dan mendorong”.

Hal ini juga menunjukkan bahwa SD Muhammadiyah Sumberejo masih memerlukan perbaikan untuk dapat memenuhi kriteria sekolah inklusif yang ramah anak. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014: 8). Untuk itu diperlukan perbaikan dan peningkatan empat manajemen perilaku untuk membangun komunitas belajar yang inklusif dan ramah anak, yang menurut Rayner (2007: 162) adalah : perilaku sekolah (etos/iklim/budaya), perilaku profesional (sikap, nilai, pengetahuan), perilaku siswa (sikap/nilai/persepsi diri), dan sistem pastoral (prosedur/protokol/ praktis).

Di sekolah inklusif semua anak diberi kesempatan untuk mendapatkan teman sejati, tidak hanya sekedar teman sebaya atau pembantu. Karena di sekolah inklusif seluruh komunitasnya menghargai perbedaan dan mendukung kualitas pendidikan para siswa. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah akan memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun keterampilan sosial baik bagi siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler. Dalam hal ini sekolah berfungsi sebagai lingkungan sosial bagi para siswa (Atta, Shah, & Khan, 2007: 272-273) Filosofi Islam memiliki sikap positif terhadap individu yang membutuhkan dan mereka yang berada di asituasi yang kurang beruntung Alquran dan Hadis

tidak hanya menyatakan eksistensi cacat sebagai bagian alami dari sifat manusia, namun juga memberikan asas dan praktis saran untuk merawat orang cacat, serta membahas pentingnya peduli hal tersebut (Al-Aoufi , Al-Zyoud & Shahminan, 2012).

3. Kerjasama Sekolah, Orangtua, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo

Dari hasil observasi selama penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa orangtua murid (termasuk ABK-nya) di SD Muhammadiyah Sumberejo mayoritas adalah dari kalangan menengah ke bawah dan berpendidikan rendah serta memiliki masalah sosial, meski ada juga sebagian kecil siswa berkebutuhan khusus yang berasal dari golongan berada. Masalah finansial keluarga dan rendahnya pendidikan orangtua berpengaruh pada pola asuh anak-anak mereka. Sebagian besar orang tua bersikap masa bodoh dan hanya mempercayakan pendidikan anak mereka pada sekolah saja. Salah satu guru di SD Muhammadiyah Sumberejo, yaitu Ibu Sutiasih, menyatakan, seringkali dia melihat beberapa siswanya lebih banyak bermain daripada belajar saat di rumah. Orangtua mereka kadang tidak peduli akan pendidikan anaknya. Namun sebenarnya ada juga sebagian orangtua yang sudah bersikap kooperatif dengan sekolah dalam menangani pendidikan anaknya. Biasanya para orang tua tipe ini lebih terbuka untuk diajak tukar pikiran tentang hambatan belajar yang dihadapi anaknya. Namun biasanya para orangtua ini tetap menuntut agar anaknya bisa mengikuti ujian nasional seperti anak-anak reguler lainnya. Jadi bentuk kerjasama itu lebih pada sosialisasi pendidikan inklusif dan *sharing* tentang pendidikan ABK.

Berdasarkan hasil penelitian Akelo (2016: 68-69) pada sekolah dasar umum di Kenya ditemukan bahwa status ekonomi dan agama yang dianut oleh keluarga berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan inklusif, sedangkan tingkat pendidikan keluarga hanya memberikan sedikit pengaruh. Alhassan (2014: 147) menemukan bahwa “sikap dan perilaku yang dihasilkan terhadap siswa cacat yang umumnya berubah menjadi kelas didasarkan pada kepercayaan agama dan budaya yang kuat yang tertanam dalam semua aspek masyarakat”. Studi yang dilakukan Lebona (2013: 166) dari di Afrika

menemukan bahwa hambatan pembelajaran tidak selalu berakar dari pelajar, tetapi faktor seperti pedagogi, keadaan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan juga halnya manifestasi kurikulum yang kaku di kebanyakan sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan penemuan-penemuan empiris lainnya.

Masyarakat di sekitar SD Muhammadiyah Sumberejo juga cukup mendukung atas pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sumberejo, Bapak Panggung Heri Setiawan menjelaskan bahwa, masyarakat tidak mempermasalahkan komitmen sekolah untuk bersedia menerima ABK sebagai peserta didiknya dan belajar bersama siswa reguler lainnya. Bahkan sebagian anggota masyarakat menyarankan sekolah untuk tetap konsisten menerima ABK sebagai peserta didik didasari rasa kemanusiaan karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Selain melibatkan masyarakat dalam komite sekolah, SD Muhammadiyah Sumberejo sering mengadakan kegiatan bersama masyarakat sekitar, misalnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya pengajian dan peringatan Idul Adha.

Salah satu guru, Bapak Nur Achmad Guntur, menyatakan bahwa SD Muhammadiyah Sumberejo juga menjalin kerjasama dengan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) yang lain, biasanya ketika penerimaan siswa baru, dalam forum-forum pertemuan dan pelaksanaan asesmen. Lebih lanjut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sumberejo juga menyatakan bahwa beberapa kali melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, kerjasama misalnya dengan menjadi lokasi penelitian yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

Joice Epstein mengusulkan *Partnership Model* yang kemudian berpengaruh pada penelitian keterlibatan orang tua, dan memberikan kebijakan sosial mengenai keterlibatan orang tua dalam pendidikan. “*The model redefines the relationship between schools, families, and communities as one of overlapping spheres of influence that share a concern about the success of the child*” (epstein, 2016). Epstein & Salinas (2004: 12) menyebutkan terdapat enam tipe *partnership* itu adalah :

- a. *Parenting* : Membantu keluarga dengan *parenting skills*, dukungan keluarga, pemahaman perkembangan anak-anak dan remaja, dan pengaturan kondisi rumah untuk

mendukung pembelajaran pada setiap usia dan tingkatan. Membantu siswa dalam memahami latar belakang keluarga, budaya dan tujuan anak-anak.

- b. *Communicating* : Berkomunikasi dengan keluarga tentang program sekolah dan perkembangan siswa. Ciptakan komunikasi timbal balik antara sekolah dan rumah.
- c. *Volunteering* : Perbaiki rekrutmen, pelatihan, kegiatan, dan jadwal untuk melibatkan keluarga sebagai *volunteers* dan sebagai *audiences* di sekolah atau di lokasi lain. Memberi kesempatan bagi para pengajar untuk bekerja dengan *volunteers* yang mendukung siswa dan sekolah.
- d. *Learning at Home* : Melibatkan keluarga dengan anak-anak mereka dalam pembelajaran akademik di rumah, misalnya dalam pekerjaan rumah, pengaturan tujuan, dan aktivitas yang berkaitan dengan kurikulum lainnya. Mendorong guru untuk mendesain pekerjaan rumah yang memungkinkan siswa untuk berbagi dan berdiskusi tugas- tugasnya.
- e. *Decision Making* : Melibatkan keluarga sebagai partisipan dalam keputusan sekolah, pengelola, dan kegiatan advokasi melalui dewan sekolah atau tim perbaikan, komite, dan organisasi orang tua.
- f. *Collaborating with the Community*: Mengkoordinasi sumberdaya dan pelayanan untuk keluarga, siswa, dan sekolah dengan kelompok komunitas, meliputi bisnis, agensi, budaya, dan organisasi masyarakat, perguruan tinggi atau universitas. Memungkinkan semua untuk berkontribusi pada komunitas.

Program kemitraan ini akan membantu orang tua untuk terlibat di sekolah dan di rumah, membantu sekolah mengatasi tantangan dan menyusun rencana, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar yang semuanya dengan tujuan untuk keberhasilan para siswa. UNESCO (2007) juga menyebutkan beberapa bentuk komunikasi hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat diantaranya adalah: Pertemuan komite sekolah dan kelompok masyarakat, Layanan sosial-layanan sosial dilakukan masyarakat di sekolah, jaringan dengan sekolah lain, informasi media cetak, dan iklan layanan publik media elektronik.

C. Simpulan

Dari hasil temuan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan khusus di Kecamatan Karangmojo pada dasarnya dimulai dengan pendidikan segregasi yang ditandai dengan berdirinya SLB Bakti Putra di Ngawis, kemudian dikembangkannya pendidikan terpadu pada tahun 80-an di bawah binaan Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed. Sejarah pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo dimulai dari dilibatkannya sekolah ini sebagai piloting project sekolah dasar terpadu yang mengadopsi konsep pendidikan inklusif, yaitu lewat program uji coba terbatas pengembangan pendidikan terpadu sekolah dasar oleh Puslitjak Balitbang Depdiknas pada akhir tahun 90-an yang dilaksanakan pada tujuh SD di Gugus SDN Karangmojo III, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Tujuh SD itu adalah : SDN Karangmojo III, SDN Sokolimann II, SDN Gedangan II, SDN Pangkah, SDN Karangwetan, SD Muhammadiyah Sumberejo, dan SDN Sokoliman II.

Kedua, Pada umumnya dalam lingkup SD Muhammadiyah Sumberejo sudah dibudayakan sikap saling menghargai dan kerjasama antar warga sekolah, termasuk pada siswa berkebutuhan khusus. Namun praktik eksklusi berupa *bullying* oleh beberapa siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus masih sering terjadi saat berlangsungnya interaksi sosial. Praktik *bullying* yang dialami oleh para siswa berkebutuhan khusus ini bisa berupa kata-kata kasar dan menyakitkan, sampai serangan fisik. Namun kadangkala hambatan yang dialami siswa berkebutuhan khusus saat berinteraksi sosial juga berasal dari faktor internal, misalnya siswa berkebutuhan khusus itu minder dan malu karena hambatan yang dimilikinya.

Ketiga, Kerjasama sekolah dan orangtua terkait pendidikan inklusif lebih dalam bentuk sosialisasi dan komunikasi. Terdapat dua tipe orangtua dalam hal ini, yaitu orang tua yang kooperatif dan non kooperatif, namun mayoritas orangtua menyerahkan begitu saja pendidikan anaknya pada sekolah. Masyarakat cukup mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Sumberejo. Bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah dalam bentuk komite sekolah dan mengadakan kegiatan bersama,

misalnya kegiatan keagamaan. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain dalam berbagai forum, penerimaan siswa baru, asesmen, maupun sebagai lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Dina. 2016. *Disability Inclusive Education in Indonesian Islamic Education Institutions*, diakses dari <http://globaldisability.org/2016/09/06/disability-inclusive-education-indonesian-islamic-education-institutions>.
- Akelo, Muga Celestine Awino. 2016. *Influence of Socio-Economic Factors on Implementation of Inclusive Education In Public Elementary Schools in Rongo Sub-County, Migory County, Kenya*. UNIVERSITY OF NAIROBIA : Research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Education in Curriculum Studies.
- Al-Aoufi, Hiam , Al-Zyoud, Nawaf & Shahminan, Norbayah. 2012. Islam and The Cultural Conceptualisation of Disability. *International Journal of Adolescence and Youth*, Vol. 17, No. 4, 205-219.
- Alhassan, Awal Mohammed. 2014. Implementation of Inclusive Education in Ghanaian Primary Schools: A Look at Teachers` Attitudes. *American Journal of Educational Research*, Vol. 2, No. 3, 142-148.
- Atta, Malik Amer, Shah, Mahmood, & Khan, M. Mumtaz. 2007. Inclusive School and Inclusive teacher. *The Dialogue Journal*, Vol. 4, No, 2, 272-284.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Pendidikan Lokal: Studi Pengembangan Model Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar di Surabaya*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Carrington, Suzanne B. & Macarthur, Jude. 2012. *Teaching in Inclusive School Communities*. Milton, Queensland : John Wiley & Sons, Ltd.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. *Mengenal Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

- Enots. 2016. *Joyce Epstein's School-Family Community Partnership Model*. Diambil pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 14.45 WIB, dari <https://www.enotes.com/research-starters/joyce-epsteins-school-family-community-partnership>,
- Epstein, Joyce L. & Salinas, Karen Clark. 2004. Partnering with families and communities. *educational leadership. Schools as learning communities*, 61,8, 12-18.
- Fitriyah, Anis. 2017. *Prevensi Bullying Siswa Dyslexia dalam Praktiknya di Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal edukasia*, Vol.12, No.1. 165-188.
- Foreman, Phil. (Ed). 2008. *Inclusion in Action*.(2nd ed). South Melbourne, Victoria: Thomson.
- Hadis, Fawzia Aswin. 2005. *Toward Inclusive, Inclusive Education in Indonesia*, a Country Report. Paper. Presented at Seisa University, Ashibetsuishi Hokkaido, Japan, 9 Juli 2005.
- Ifdlali.27 Januari 2010. *PENDIDIKAN INKLUSIF (Pendidikan anak berkebutuhan khusus)*. Diakses dari <http://dokumen.tips/documents/pendidikan-inklusi-55a3591e31fa9.html>
- Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2014). *Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah anak*. Jakarta: Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendiikan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lebona, Teboho Godfrey. 2013. *The Implementation of Inclusive Education in Primary schools in The Lejweleputswa Education District*. Tesis, Free State: Central University of Technology.
- Mangunsong,Farida. 2011. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Jilid Kedua*. Depok: LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Mu'arif. 2012. *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadijah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mukaffa, Zumrotul, Taufik, Huda, M.Nuril. 2017. Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif MI Al-Hidayah, Margorejo, Surabaya). *Jurnal Edukasia*, Vol. 12, No. 12, 1-30.

- Semiawan, Conny R. 2008. *Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar* (rev). Yufiarti, setiawan, T.I. (ed). Jakarta: Indeks. (Ditcetak pertama kali tahun 2002).
- Rayner, Steve. 2007. *Managing Special and Inclusive Education*. London: Sage Publications.
- Schunk, Dale H., 2012. *Learning theories : An Educational Perspective. (Teori-Teori pembelajaran: perspektif pendidikan)*. Edisi Bahasa Indonesia (Ed.6). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, J.David. 2013. *Sekolah Inklusif*. (Terjemahan oleh Denis & Ny.Enrica). Sugiarmun, M. (Ed). Bandung: Nuansa Cendekia. (Buku asli diterbitkan Tahun 1998).
- Stubbs, Sue. 2008. *Inclusive Education Where There are Few Resources* (rev). Lewis, I (Ed). Diakses dari <http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf>.
- Subijanto, 2002. Pengembangan pendidikan terpadu di sekolah dasar. KTI Online (7 April 2009). Diakses dari <http://www.ktiguru.net/mod/data/view.php?id=3&rid>.
- Sunardi. 2010. *Kurikulum pendidikan luar biasa di indonesia dari masa ke masa*. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- UNESCO. 2007. *Tulkit LIRP, Merangkul perbedaan: perangkat untuk mengembangkan lingkungan inklusif, ramah terhadap pembelajaran*. (Versi Revisi Indonesia) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, IDP Norway, Helen Keller Internasional. (Pertama diterbitkan tahun 2004).
- Wahyuningsih, Sri. 2016. Inclusive Education for Person with Diasabilities. *Qudus Internasional Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, Issue 1, 1-18.
- Wang, Huei Lan. 2009. Should All Students with Special Educational Needs (SEN) Be Included in Mainstream Education Provision? - A Critical Analysis. *Journal of International Education Studies*, Vol. 2, No. 4, 154-161.
- Zamroni. 2014. *Percikan Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ombak.